

**Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia:
Dampak Penerapan PSAK 71**

Meilynda Ahlam Matoviany¹, Amrie Firmansyah²,

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Tangerang Selatan, 15222, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 26 Februari 2021

Revisi: 28 Maret 2021

Diterima: 30 Maret 2021

Keywords:

Financial investment, standard financial accounting, banking

Abstract

This study aims to review the impact of psak 71 implementation on banking companies that have financial investments, especially bond holdings. The method used in this study is qualitative method with content analysis. The data used in this study is secondary data in the form of financial statements of 6 banking sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study concluded that accounting policies related to bond investments from 6 companies used in the study are valid since January 1, 2020, in accordance with PSAK 71.

Citation: Matoviany, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia: Dampak Penerapan PSAK 71. 1(1), 11-32.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang memiliki investasi keuangan khususnya kepemilikan obligasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis isi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 6 perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi terkait investasi obligasi dari 6 perusahaan yang digunakan dalam penelitian yang berlaku sejak 1 Januari 2020, yaitu sesuai dengan PSAK 71.

Kata Kunci:

Investasi keuangan, standar akuntansi keuangan, perbankan

JEL Classification: M41, G21, G11

Penulis Korespondensi:

Amrie Firmansyah

amrie.firmansyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam proses bisnis, suatu perusahaan berpotensi memiliki kelebihan dana dalam bentuk kas karena usaha yang dijalankan sangat profitabel atau mampu mencapai target (Mudjiyono, 2012). Kelebihan dana tersebut harus dioptimalkan penggunaannya untuk mencegah adanya kas menganggur (*idle cash*) yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satu pemanfaatan *idle cash* dilakukan dengan berinvestasi. Investasi merupakan kegiatan pemanfaatan kas yang dimiliki pada masa kini dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar di masa mendatang (ahli ekonomi, Horn (1981) dalam undercover.co.id, 2017). Investasi termasuk salah satu aset yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekuitas perusahaan melalui pendapatan hasil investasi seperti pendapatan sewa, dividen, bunga atau royalti (undercover.co.id).

Secara teoritis, investasi terdiri dari dua kategori, yaitu investasi atas aset riil dan investasi atas aset keuangan (Oliver, 2013). Investasi atas aset riil dilakukan dengan cara menempatkan aset berwujud, seperti bangunan, tanah, peralatan dan sebagainya, sedangkan investasi atas aset keuangan dilakukan dengan cara menempatkan aset tak berwujud, berupa penanaman modal pada instrumen keuangan: saham, obligasi atau valuta asing melalui pasar modal maupun pasar uang.

Berdasarkan kategori-kategori investasi yang ada, investasi pada instrumen keuangan obligasi merupakan salah satu investasi yang minim resiko. Menurut Fajrian (2019), obligasi merupakan investasi yang paling menarik dan diminati oleh para investor dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan hasil survei pada 260 pengelola dana investasi. Jumlah investor yang berinvestasi pada obligasi semakin banyak dari tahun ke tahun, dilihat dari grafik yang menunjukkan peningkatan secara signifikan (Sal, 2019).

Obligasi semakin diminati oleh investor dibanding instrumen keuangan lain, seperti saham karena beberapa alasan, yaitu: (1) obligasi memiliki volatilitas/fluktuasi perubahan harga pasar yang lebih rendah dibanding saham, sehingga jumlah investasi pada saham mengalami penurunan; (2) obligasi memiliki tingkat imbal hasil positif, yaitu pendapatan tetap yang diperoleh dari bunga kupon secara periodik dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo, sehingga obligasi lebih memberikan jaminan dibanding saham (Jaluanto & Nafi'ah, 2016); dan (3) investor memiliki hak pertama atas aset perusahaan penerbit ketika penerbit mengalami likuidasi karena adanya kontrak yang telah mengikat penerbit untuk melunasi obligasi (Dewi & Suaryana, 2017).

Meskipun obligasi merupakan investasi yang minim risiko, investor tetap memiliki kemungkinan risiko kerugian, baik dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan (Prastika, 2017). Obligasi umumnya diterbitkan ketika perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah besar atau sedang mengalami masalah keuangan. Ketika perusahaan bangkrut, investor berisiko tidak menerima pelunasan pokok obligasi tepat waktu atau bahkan seluruh pokok obligasi tidak dapat kembali. Permasalahan ini disebut kredit macet. Dalam permasalahan kredit macet, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta lebih berisiko dibanding perusahaan pemerintah karena perusahaan pemerintah memiliki rating penerbitan obligasi yang termasuk dalam investment grade (level A), yaitu kemampuan dalam melunasi bunga kupon secara periodik dan nilai pokok obligasi saat jatuh tempo (Prastika, 2017).

Salah satu fenomena gagal bayar obligasi terjadi pada tahun 2019 oleh perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Delta Merlin Dunia Textile yang menerbitkan obligasi sebesar 300 juta dollar AS bertenor 5 (lima) tahun dengan kupon 8,625% (kompas.com, 2019) kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Pada dasarnya, BCA sudah berhati-hati dan konservatif dalam memilih debitur. Sebelumnya, rekam jejak hutang PT Delta kepada para kreditur juga tidak bermasalah. Dua perusahaan pemeringkat, Fitch Ratings dan Standard and Poor's (S&P) Global Ratings memberikan peringkat awal pada obligasi PT Delta di posisi BB-. Menurut Fitch, peringkat awal tersebut diberikan berdasarkan asumsi bahwa PT Delta akan mengumpulkan dana yang cukup dari penerbitan obligasi untuk membiayai kembali berbagai fasilitas kredit dari perbankan. Demikian pula, S&P Global Ratings menilai PT Delta memiliki profil kredit mandiri yang kuat. Fenomena kegagalan pembayaran obligasi ini merupakan permasalahan yang sering dihadapi banyak perusahaan sektor keuangan akibat risiko investasi obligasi yang dimilikinya dan memerlukan tindakan preventif untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

Dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi, investor membutuhkan informasi laporan keuangan yang lengkap dan komprehensif guna memudahkan dalam memperkirakan dan meminimalisir kemungkinan gagal bayar dan risiko-risiko investasi lainnya. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan yang baik dan benar harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan, terdiri dari: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50: Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK 55:

Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan, serta PSAK 60 Pengungkapan Instrumen Keuangan.

Pada tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengacu sistem International Financial Reporting Standards (IFRS) menerbitkan PSAK 71 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK 71 secara keseluruhan menggantikan pengaturan instrumen keuangan dalam PSAK 50, 55 dan 60, tetapi secara signifikan memberikan perubahan dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55. Perubahan aturan ini terkait dengan klasifikasi aset keuangan, termasuk hal penting tentang pencadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, seperti pinjaman/kredit dan piutang. Standar akuntansi baru ini secara mendasar mengubah prosedur estimasi dan penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai/CKPN akibat kredit macet.

Dalam PSAK 55 (2015), kewajiban pencadangan baru dilakukan apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar. Berbeda dengan PSAK 71 (IAI, 2017) yang memberikan peraturan bagi perusahaan untuk melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai aset sejak awal periode kredit, sehingga akan mengakibatkan CKPN yang dimiliki perusahaan lebih besar dibanding masa sebelum PSAK 71 (IAI, 2017) berlaku (Syafina, 2019). Peningkatan CKPN juga akan berdampak pada penurunan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) dan net income perusahaan. Sesuai PSAK 71, perusahaan sektor keuangan harus menyediakan CKPN untuk semua kategori kredit mulai dari yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), sampai dengan macet (*non-performing*). Menurut Ketua IAPI (2019), perhitungan CKPN didasarkan pada ekspektasi kerugian kredit (*expected loss*) selama 12 bulan ke depan. Ekspektasi kerugian kredit lebih dini diharapkan akan mengurangi risiko kegagalan pembayaran kredit.

Perubahan standar akuntansi keuangan ini merupakan upaya solutif terhadap sejumlah risiko yang dihadapi perusahaan, khususnya sektor keuangan dalam risiko kegagalan pembayaran kredit dari debitur. Menurut Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2019), perusahaan yang terdampak atas penerapan PSAK 71 (IAI, 2017) adalah perusahaan perbankan dan perusahaan yang memiliki banyak investasi di sektor keuangan, seperti investasi obligasi. Perusahaan sektor keuangan merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan berupa deposito, tabungan, asuransi,

reksadana, saham dan obligasi. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan adalah memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, salah satunya dengan menginvestasikan dana dari investor kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang lebih besar (Aderianti, 2018).

Penelitian-penelitian terkait dengan obligasi telah dilakukan sebelumnya antara lain oleh Sunarjanto & Tulasi (2013) dengan menguji kemampuan rasio keuangan (*leverage*, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas) dan corporate governance dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan yang tergolong investment grade dan perusahaan yang tergolong non-investment grade. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi & Suaryana (2017) menguji pengaruh produktivitas dan pertumbuhan perusahaan pada peringkat obligasi, dan pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh produktivitas dan pertumbuhan perusahaan pada peringkat obligasi. Sementara itu, Vina (2017) menguji pengaruh variabel-variabel independen antara lain reputasi auditor, umur obligasi, likuiditas, growth dan produktivitas perusahaan terhadap peringkat obligasi. Penelitian Alkhatiri & Firmansyah (2018) mengulas penerapan kebijakan akuntansi obligasi dalam kerangka PSAK Nomor 50, 55, dan 60 menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah BUMN sektor konstruksi dengan menggunakan data laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan selama 5 tahun (2013-2017).

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap peringkat obligasi dan mengulas penerapan investasi obligasi dengan menggunakan PSAK 55 dan 60. Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan akuntansi atas aset keuangan investasi obligasi sesuai dengan PSAK 71 yang baru berlaku 1 Januari 2020. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penelitian ilmiah dengan cara mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi. Melalui metode ini memungkinkan untuk

melakukan pengolahan data sekunder berupa laporan keuangan yang bersumber dari laman Bursa Efek Indonesia www.idx.com dengan memperhatikan konteksnya, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Triwulan 1 tahun 2020 dan Laporan Keuangan tahun 2019 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan informasi tambahan, penelitian ini juga menggunakan laporan tahunan perusahaan dan informasi dari situs online terkait dengan informasi pendukung. Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei 2020, sehingga informasi penerapan PSAK 71 (2017) hanya tersedia dalam Laporan Triwulan 1 2020. Sementara itu, penggunaan Laporan Keuangan tahun 2019 digunakan sebagai pembandingan dalam penerapan akuntansi atas investasi obligasi yang dimiliki perusahaan perbankan dengan menggunakan PSAK 55 (2015) dan PSAK 60 (2016).

Pada bulan Mei 2020, terdapat 43 perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Juni 2020. Dari jumlah tersebut, penelitian ini memilih 6 perusahaan berdasarkan jenis kepemilikan dan mempunyai nilai aset yang terbesar pada masing-masing kepemilikan perusahaan berdasarkan data laporan keuangan tahun 2019. Adapun perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

Kode	Nama Emiten	Jenis Bank	Total Aset (Dalam jutaan rupiah)
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN	1,318,246,335
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	1,416,758,840
BPDR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Tbk	BPD	123,536,474
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	SWASTA	918,989,312
AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	SWASTA	27,067,922,912
SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	CAMPURAN	36,936,262

HASIL

Berdasarkan analisis isi yang telah dilakukan dari Laporan Keuangan enam perusahaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Efek-efek yang dimiliki antara lain Obligasi Pemerintah, unit penyertaan reksa dana, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, sertifikat deposito yang dapat dipindahtangankan, surat berharga jangka menengah dan obligasi lainnya yang dibeli dari pasar primer dan sekunder; obligasi Pemerintah yang tidak di-rekapitalisasi seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan obligasi Pemerintah mata uang asing yang dibeli dari pasar primer dan pasar sekunder. Untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang dikeluarkan Pemerintah dalam rencana injeksi modal bank komersial, diantaranya: obligasi rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder. Efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah tersebut pada awalnya disajikan pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek akan dicatat dalam kategori: biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah dilakukan sesuai dengan kategori 1) dimiliki hingga jatuh tempo, yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, 2) diperdagangkan diukur pada nilai wajar, dan kemudian karena Keuntungan/(kerugian) yang timbul dari perubahan nilai wajar dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; 3) nilai wajar diukur pada nilai wajarnya melalui pendapatan komprehensif lain, atas penghasilan bunga (menggunakan metode suku bunga aktual) dan keuntungan / (Kerugian) karena perbedaan nilai tukar dicatat dalam laba rugi konsolidasi dan penghasilan komprehensif lain. Apabila terdapat perubahan nilai wajar lainnya, maka akan dicatat langsung pada ekuitas dan apabila penurunan nilai terjadi atau akan dijual, maka laba rugi kumulatif akan direklasifikasi dari akun ekuitas ke laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian lainnya.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Efek-efek yang dimiliki diantaranya efek yang diperjualbelikan melalui pasar uang, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Medium Term Notes, Treasury Bills, Negotiable Certificates of Deposits yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri dan Pemerintah Republik Indonesia; wesel ekspor; efek yang diperjualbelikan melalui pasar modal seperti unit reksadana; serta efek yang diperjualbelikan melalui bursa efek, seperti saham dan obligasi, termasuk obligasi syariah korporasi. Pada pengakuan awal, Efek dan obligasi

pemerintah akan dikelompokkan berdasarkan model bisnis untuk mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan.

Kategori pertama adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar laba rugi untuk model bisnis: (i) instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, tujuan utama kepemilikan adalah untuk menjual atau membeli kembali aset keuangan dalam waktu dekat, atau jika itu adalah kombinasi dari instrumen keuangan tertentu dengan model laba dalam jangka pendek; atau (ii) termasuk dalam kategori aset keuangan ini yang ditetapkan oleh Bank Mandiri saat pertama kali pengakuan. Pada saat pengukuran awal, aset keuangan kategori ini dicatat sesuai nilai wajarnya, sedangkan untuk biaya transaksi dicatat langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Apabila terdapat keuntungan / kerugian sebagai hasil perubahan dari nilai wajar, penghasilan bunga, atau penjualan instrumen keuangan, maka akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, akun pendapatan dari kelompok diperdagangkan (neto).

Kategori kedua adalah aset keuangan yang diukur pada dari wajar penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi ini berlaku untuk model bisnis berikut: memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan pada tanggal spesifik untuk meningkatkan arus kas, yaitu arus kas dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) sesuai kesepakatan kontrak. Pada pengukuran awal, kategori ini dihitung berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar dan keuntungan/(kerugian) karena perubahan nilai wajar, keuntungan/(kerugian) dari perbedaan nilai tukar atau kerugian penurunan nilai dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Kerugian kredit ekspektasian dicatat sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan). Atas penghasilan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga aktual.

Kategori ketiga adalah aset keuangan yang diukur dari biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini berlaku untuk model bisnis berikut: tujuan utama memperoleh aset keuangan adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, dan untuk meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga pada tanggal tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak. Pada pengukuran awal, kategori ini dicatat berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi, pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan

diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Penghasilan bunga akan diakui sebagai "pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Apabila kerugian penurunan nilai terjadi, maka akan dikurangkan dari nilai buku aset keuangan dan dicatat sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai" dalam laporan keuangan konsolidasian.

Keadaan yang terkait dengan penentuan nilai wajar posisi keuangan konsolidasian aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: untuk investasi dalam unit reksadana disajikan sesuai nilai pasarnya, yaitu sebesar nilai aset bersih dari reksadana; untuk sekuritas yang diperjualbelikan melalui pasar keuangan terorganisir, nilai wajarnya sesuai dengan harga pasar bursa pada tanggal terakhir; untuk efek tanpa harga pasar, estimasi nilai wajar konsisten dengan nilai wajar instrumen lain yang memiliki substansi yang sama atau dihitung menggunakan arus kas yang diharapkan dari aset bersih sekuritas. Apabila nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi menurun secara permanen, maka akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Apabila efek dari kategori nilai wajar penghasilan komprehensif lain direklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, maka akan langsung dilaporkan pada nilai wajarnya. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi tetap dilaporkan di bagian ekuitas dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan kemudian disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sepanjang umur efek yang tersisa.

3. PT Bank Central Asia Tbk

Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar laba rugi yang dimiliki oleh BCA meliputi sekuritas yang diperjualbelikan melalui pasar mata uang, seperti Surat Perbendaharaan Negara, Surat Perbendaharaan Negara Syariah, surat berharga Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, obligasi perusahaan, instrumen keuangan derivatif dan surat berharga yang diperjualbelikan melalui bursa efek. Efek yang dimiliki oleh BCA untuk tujuan investasi meliputi: sekuritas yang diperjualbelikan melalui pasar mata uang dan bursa efek, seperti obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, sertifikat bank Indonesia, obligasi syariah, unit penyertaan reksadana, saham dan medium term notes. Surat berharga yang digunakan untuk tujuan investasi diklasifikasikan sebagai aset

keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan diukur dengan nilai wajar penghasilan komprehensif lain. Sejak 1 Januari 2020, manajemen BCA akan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan tujuan untuk memilikinya pada saat pengakuan awal.

Kategori pertama diukur pada nilai wajar laba rugi, dengan karakteristik: perolehan/ kepemilikan aset untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau salah satu portofolio instrumen keuangan tertentu dengan penggunaan finansial dari model laba jangka pendek. Pada pengukuran awal, kategori ini akan dicatat pada nilai wajarnya, sedangkan biaya transaksi langsung dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Apabila terdapat keuntungan / (kerugian) dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan, maka akan dicatat sebagai "keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "keuntungan dari penjualan instrumen keuangan" dalam laporan laba rugi konsolidasian. Untuk penghasilan bunga dilaporkan sebagai "pendapatan bunga".

Kategori kedua adalah aset keuangan dengan biaya diamortisasi, pada karakteristik sebagai berikut: aset keuangan non-derivatif, jumlah pembayaran dan jatuh tempo telah ditentukan, bertujuan untuk memiliki aset keuangan sampai jatuh tempo. Pada pengukuran awal, kategori ini dihitung berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, pengukuran dilakukan pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga aktual dikurangi provisi penurunan nilai. Penghasilan bunga diakui sebagai "pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasian. Apabila kerugian penurunan nilai terjadi, nilai buku investasi akan dikurangi dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan".

Kategori ketiga adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain dengan karakteristik: instrumen keuangan non-derivatif, hanya dimiliki dalam periode tertentu dan akan dijual untuk memenuhi perubahan likuiditas atau suku bunga / valuta asing. Pada pengukuran awal, dicatat sesuai nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, pengukuran didasarkan pada nilai wajarnya, dan keuntungan / (kerugian) yang dihasilkan dari perubahan nilai wajar akan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Apabila terjadi penurunan nilai, maka akan dilakukan reklasifikasi akumulasi keuntungan/(kerugian) dari pos komprehensif lainnya menjadi pos laba rugi. Untuk keuntungan / (kerugian) dari aset moneter karena

perubahan nilai tukar / nilai tukar mata uang asing akan dicatat dalam laporan laba rugi. Untuk penghasilan bunga tetap dicatat sesuai metode suku bunga efektif.

4. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Efek BRI AGRO diantaranya adalah: Obligasi Pemerintah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit investasi reksa dana, wesel jangka menengah, sertifikat deposito yang dapat dipindahtangankan, dan obligasi lainnya; obligasi pemerintah non-rekapitalisasi, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi Pemerintah berdenominasi mata uang asing yang dibeli dari pasar primer dan sekunder. Pada pengakuan awal, efek dan obligasi rekapitalisasi diukur pada nilai wajar dan kemudian diukur sesuai dengan klasifikasinya.

Kategori pertama adalah efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Kategori kedua adalah efek yang diperdagangkan, diukur pada nilai wajar, dan kemudian keuntungan / (kerugian) yang timbul dari perubahan nilai wajar akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kategori ketiga adalah efek dari kelompok nilai wajar pendapatan komprehensif lainnya. Untuk kategori ketiga ini, ada beberapa pengaturan terkait lainnya: penghasilan bunga (dihitung menggunakan metode suku bunga aktual) dan keuntungan / kerugian kurs mata uang asing akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; perubahan lain dalam nilai wajar langsung dicatat dalam ekuitas. Namun, apabila nilai wajar berubah karena penjualan efek atau penurunan nilai, maka laba rugi kumulatif akan direklasifikasi dari akun ekuitas ke laporan laba rugi komprehensif lain.

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Surat berharga yang dimiliki oleh BJB meliputi Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Reksa Dana dan Obligasi yang diperjualbelikan melalui Bursa Efek. Pada pengukuran awal, surat berharga tersebut dicatat pada nilai wajarnya, kemudian pengukuran selanjutnya dicatat sesuai dengan klasifikasinya. Untuk surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai perolehan.

Kategori pertama adalah surat berharga yang diukur pada nilai yang diperoleh dan dicatat dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Apabila terjadi peningkatan risiko kredit dalam kategori ini, maka surat berharga dapat dijual dari portofolio diukur pada nilai perolehan. Penjualan aset

diperbolehkan untuk alasan lain, namun harus dalam jumlah yang tidak signifikan atau tidak sering. Kategori kedua adalah surat berharga yang diukur dengan nilai wajar penghasilan komprehensif lain dan dicatat sesuai nilai wajarnya. Penghasilan bunga (dihitung menggunakan metode suku bunga aktual) dan laba / rugi akibat perbedaan nilai tukar akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Apabila terdapat perubahan lain dalam nilai wajar, maka akan secara langsung dicatat dalam ekuitas, dan apabila surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, maka akan direklasifikasi laba/(rugi) kumulatif yang sebelumnya dimasukkan dalam akun ekuitas ke laba rugi konsolidasian dan komprehensif lainnya

Kategori ketiga adalah surat berharga yang diukur dengan nilai wajar laba rugi dan dicatat pada nilai wajar. Penghasilan bunga (dihitung berdasarkan kontrak) dan keuntungan / (kerugian) yang belum direalisasi karena kenaikan / (penurunan) nilai wajar akan dicatat dalam laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif lain periode berjalan.

6. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Efek yang dimiliki perusahaan meliputi wesel tagih, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), Sertifikat Deposito Bank Indonesia ("SDBI"), obligasi korporasi yang diperjualbelikan melalui pasar mata uang dan bursa efek; serta Obligasi Pemerintah. Selain itu, BWS juga memiliki Surat Berharga Syariah atau surat berharga investasi berbasis syariah yang biasanya diperjualbelikan melalui pasar mata uang islam dan / atau pasar modal syariah, seperti sukuk/(obligasi islam) dan surat berharga berbasis syariah lainnya. Pada pengukuran awal, efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki diakui berdasarkan klasifikasinya, yaitu aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diukur dengan nilai wajar dari pendapatan komprehensif lain atau diukur dengan nilai wajar dari laba rugi.

Kategori pertama adalah aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, memiliki karakteristik: model bisnis yang dirancang untuk menerima arus kas kontraktual, dan perjanjian kontraktual menghasilkan hak untuk memperoleh arus kas dari pembayaran pokok dan bunga utang pada tanggal tertentu (SPPI). Kategori kedua adalah aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar dari pendapatan komprehensif lain, memiliki karakteristik: model bisnis untuk tujuan menerima arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan serta memperoleh kriteria SPPI dalam perjanjian

kontrak. Kategori ketiga adalah aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar laba rugi, merupakan aset keuangan yang tidak termasuk dua karakteristik dari aset keuangan sebelumnya. Pada pengukuran awal, Bank diperbolehkan untuk menentukan klasifikasi aset keuangan melalui akun laba rugi (pemilihan opsi nilai wajar) untuk mengamortisasi aset keuangan yang diakuisisi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dan yang perubahannya termasuk dalam pendapatan komprehensif lain.

Kategori ketiga adalah aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yaitu aset keuangan yang tidak termasuk dalam karakteristik 2 (dua) kategori aset keuangan sebelumnya. Pada saat pengukuran awal, Bank diperbolehkan menetapkan klasifikasi aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar dari penghasilan komprehensif lain menjadi kategori aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar dari laba rugi (memilih opsi *fair value*). Penetapan tersebut bertujuan untuk mengurangi inkonsistensi pengukuran/pengakuan (*accounting mismatch*). Namun, apabila sudah ditetapkan demikian dari awal, selanjutnya tidak dapat diubah kembali.

PEMBAHASAN

Dampak penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 71 terkait dengan kepemilikan investasi pada instrumen keuangan khususnya obligasi pada enam perusahaan sub sektor perbankan adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait instrumen keuangan investasi obligasi dari PSAK 55 ke PSAK 71 adalah: klasifikasi dan pengaturan pengukuran aset keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual dari arus kas dan model bisnis yang sebelumnya dalam PSAK 55 hanya berdasarkan intensi manajemen; serta pengaturan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss impairment model*) yang lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan, sehingga membuat informasi lebih tepat waktu, relevan dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dimana sebelumnya dalam PSAK 55 kerugian kredit baru diakui ketika peristiwa kerugian kredit telah terjadi.

Pada tahun 2019, BRI telah melakukan banyak pendidikan dan pelatihan internal terkait penerapan PSAK 71. Implementasi PSAK 71 juga termasuk salah satu anggaran

proyek utama Direktorat Teknologi dan Operasional tahun 2019, Divisi Akuntansi dan Manajemen. BRI telah secara komprehensif melakukan berbagai persiapan dalam rangka penerapan PSAK 71, baik dalam bentuk pengawasan dan monitoring oleh dewan komisaris, rapat antar direksi, rapat komite, maupun mengikuti pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh PWC dan BARA Risk Forum. Direktur Keuangan BRI menyampaikan bahwa telah dilakukan perkiraan perhitungan tambahan CKPN di tahun 2019 sebesar 8 triliun rupiah dalam rangka mempersiapkan penerapan PSAK 71.

BRI juga telah memilih platform *Statistical Analysis System (SAS)* untuk membantu menganalisis sejumlah besar data serta menyesuaikan perubahan pendekatan dalam menerapkan solusi manajemen risiko dan keuangan di seluruh 12 segmen bisnis yang dimiliki (Fachrizal, 2019). *SAS Expected Credit Loss* memastikan implementasi model risiko yang cepat dan efisien, serta untuk upaya pengujian dan pemeliharaan di luar tenggat waktu implementasi PSAK 71 di Indonesia, yaitu pada tahun 2020. *SAS Expected Credit Loss* telah menjadi *platform* pilihan untuk pemodelan kerugian kredit yang transparan, cepat, dan efisien demi kepatuhan terhadap standar IFRS 9 oleh bank-bank terkemuka di ASEAN.

Pada tahun 2019, BRI telah mempersiapkan pencadangan yang cukup untuk dapat menekan rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) secara gradual (Sahara, 2020). Apabila NPL menurun, maka pencadangan tidak akan dinaikkan lagi karena rasio pencadangan sudah cukup besar. Sementara itu, terkait dampak dari wabah virus corona, BRI mengaku telah memperhitungkan adanya perlambatan ekonomi global yang juga berdampak pada pertumbuhan bisnis. Dalam meminimalisir risiko yang terjadi di global dan domestik, BRI telah memperkuat manajemen risiko yang ada, baik dengan mengikuti PSAK 71, kemampuan menghimpun laba serta mengalokasikan cadangan penurunan nilai. Tahun 2020 direncanakan akan mencapai pertumbuhan kredit sebesar 10-12 %, simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) 10-12 %, laba 10-11 %, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) 89-90%.

PSAK 71 mengeliminasi klasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK 55, yaitu: dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Pengukuran kembali dilakukan dengan cara rekonsiliasi nilai cadangan kerugian aset keuangan dan mengakibatkan saldo aset keuangan berkurang. Dalam penerapan PSAK 71 di tahun 2020, BRI juga entitas lainnya mengalami kendala ekonomi akibat wabah corona yang terjadi di Indonesia. BRI

telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak wabah corona (Nurdiana, 2020). Hingga kuartal I-2020, 41% dari total kredit yang direstrukturisasi adalah kredit komersial kecil dan mikro 24,3%. Untuk kredit yang direstrukturisasi dari segmen korporasi, BUMN dan konsumen masing-masing sebesar 16,3%, 11,7% dan 3,3% dari total kredit tersebut. Berdasarkan kualitas kredit, 54,8% dari kredit yang direstrukturisasi masih berstatus lancar, 26,1% berstatus dengan perhatian khusus (*special mention loans/SML*) dan 19,1% masuk dalam kategori *non performing loan (NPL)*. Untuk merestrukturisasi kredit UMKM karena wabah corona, pemerintah memberikan relaksasi dengan memperbolehkan statusnya tetap *koll-1* (cepat). Meski demikian, BRI telah meningkatkan CKPN sebesar 60,4% yoy di kuartal I-2020 menjadi Rp 58,7 triliun. Target laba bersih juga diturunkan karena potensi pendapatan bunga menurun akibat restrukturisasi kredit terdampak wabah corona.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Tata Kelola Komprehensif telah mengadakan tiga pertemuan rapat dan melakukan upaya pencapaian PSAK 71 di Grup Mandiri. Bank Mandiri juga menerapkan teknologi digital penghitungan *real time* untuk mengimplementasikan PSAK 71 (bankmandiri.co.id). PSAK 71 memberikan ketentuan baru dalam mengurangi risiko kerugian, sehingga Bank Mandiri menjadi lebih selektif dalam memilih bisnis yang akan menerima kreditnya. Bank Mandiri, yang memiliki 22 juta pelanggan ritel dan menyediakan pembiayaan untuk segmen pasar korporasi, komersial dan UMKM, harus memastikan bahwa proses bisnis yang kuat dan pasar eksklusif adalah syarat utama untuk pembiayaan. Selain itu, nilai agunan yang diberikan dalam pinjaman adalah faktor penentu.

Pihak Bank Mandiri menyampaikan bahwa inovasi teknologi informasi diperlukan untuk mempercepat perhitungan cadangan kerugian untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis karena perhitungan PSAK 71 lebih kompleks dari sebelumnya. Untuk tujuan ini, Bank Mandiri telah memperkuat sistem sehingga penerapan PSAK 71 dapat berjalan secara optimal.

Penerapan PSAK 71 tidak memberi dampak yang signifikan kepada Bank Mandiri karena di tahun-tahun sebelum diterapkannya PSAK 71, pencadangan dana Bank Mandiri sudah konservatif (Dirgantara, 2020). PSAK 71 dinilai lebih berdampak kepada bank-bank yang lebih kecil. Penerapan PSAK 71 menambah provisi Bank Mandiri antara Rp 21 triliun - Rp 25 triliun dan akan dibebankan langsung ke laba ditahan. Selain itu, CAR Bank

Mandiri menurun menjadi 18,9% - 19,2%, lebih kecil dibandingkan CAR pada Desember 2019 yang berada di 21,4,%. Dampak positif PSAK 71 adalah ratio NPL coverage akan berada di level antara 255% - 275% dan ratio Loan at Risk (LaR) coverage diperkirakan akan berada di level antara 63% - 67%. Pada Januari 2020, implementasi PSAK 71 telah menurunkan laba ditahan Bank Mandiri sebesar Rp 18,2 triliun. Namun, Bank Mandiri memiliki manajemen risiko yang baik, sehingga biaya kreditnya cenderung flat.

3. PT Bank Central Asia Tbk

Salah satu upaya BCA dalam melakukan persiapan penerapan PSAK 71 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2019. Fokus manajemen risiko BCA pada tahun 2019 adalah mengembangkan model parameter risiko, seperti PD (*Probability of Default*), LGD (*Lost Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*). Model ini akan digunakan sebagai bagian dari perhitungan CKPN dan akan pada 1 Januari 2020 diimplementasikan. PSAK 71 menerapkan konsep *expected loss*, yang mengharuskan bank untuk membentuk CKPN sejak awal periode kredit, termasuk sisa pinjaman yang tidak digunakan. Peraturan ini menghasilkan CKPN yang lebih besar dibanding ketika PSAK 55 pembentukan cadangan baru dilakukan saat pembayaran terlambat dilakukan.

Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 dan Panduan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-AI) tertanggal 2 April 2020, pemerintah memberikan relaksasi berupa penggolongan debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi kredit masuk dalam stage 1 perhitungan dan tidak perlu ada tambahan CKPN sebagai respon sektor jasa keuangan di tengah pandemi corona. Presiden PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkirakan PSAK 71 berpotensi menurunkan modal perseroan sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun. Aturan relaksasi kredit dalam situasi pandemi corona, membuat banyak nasabah meminta bunga bank diturunkan, restrukturisasi kredit, maupun pernyataan tidak sanggup bayar, sehingga membuat potensi kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) cukup tinggi. Dalam hal ini, alokasi dana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) lebih tinggi dari kondisi normal dan mengakibatkan likuiditas keuangan terganggu serta berpotensi menurunkan laba pembukuan.

Hingga Februari 2020 pencadangan BCA bertambah menjadi Rp 1,09 triliun dari sebelumnya Rp 348 miliar (Hamdan, 2020). Namun, kondisi tersebut dapat sedikit teratasi karena kinerja tahun 2019 yang berhasil menghimpun laba sebesar Rp 28,6 triliun, atau

melonjak dari 2018 yang sebesar Rp 25,9 triliun. Dari sisi likuiditas BCA juga berada diposisi yang mapan dengan rasio kecukupan modal sebesar 23,8%, jauh diatas ketentuan minimum 8%. Selain itu, volume kredit yang disalurkan dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber tercatat sebesar 80,5%, jauh dari ketentuan maksimum OJK, yakni 110%. Menurut analis Danareksa Sekuritas Eka Savitri, penerapan PSAK 71 diproyeksikan hanya berimbas minimal terhadap ekuitas BCA dan membuat peningkatan dana pencadangan dengan perkiraan Rp 5,4-5,8 triliun.

4. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

BRI Agro menjelaskan dalam laporan tahunan 2019 bahwa stabilitas keuangan sistem perbankan nasional terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dalam rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bank yang tinggi, yaitu 23,3% dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih sangat rendah, yaitu 2,5% (nilai total) atau 1,2. % (bersih), tetapi meningkat 2,4% (nilai total) atau 1,0% (bersih) dibandingkan dengan 2018. Kenaikan NPL berdampak pada profitabilitas perbankan nasional pada 2019 dengan pertumbuhan sebesar 65% (YoY) yang menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang pertumbuhannya sebesar 14,38% (YoY). Kondisi ini dicermati dan diantisipasi oleh BRI Agro di tahun 2020 karena akan diterapkannya PSAK 71 agar kinerja perbankan tidak terdampak secara langsung.

Setelah penerapan PSAK 71 yang mengharuskan bank menambah biaya pencadangan, sejumlah bank salah satunya BRI Agro tetap memproyeksi permodalan yang semakin tinggi. Sekretaris Perusahaan BRI Agro, menyampaikan bahwa CAR BRI Agro per tahun 2019 berada di level 24,28%, sangat jauh di atas ketentuan yang berlaku. Tahun 2020 BRI Agro memproyeksikan CAR masih di atas 21% (Sitanggang, 2020).

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BJB dalam mempersiapkan penerapan PSAK 71, salah satunya dapat dilihat dalam laporan tahunan 2019. Perusahaan telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan terkait implementasi PSAK 71 dan risiko manajemen yang diselenggarakan oleh RMG (*Risk Management Guard*), *Banker Association For Risk Management* (BARA) dan BJB University. BJB telah menerapkan sejumlah proyek aplikasi sepanjang tahun 2019, salah satunya adalah penerapan PSAK 71. BJB telah melakukan antisipasi dengan mengalokasikan 42,56% dari laba bersih tahun buku 2018 atau sekitar Rp 651.647.819.610 sebagai penguatan CKPN sesuai PSAK 71 (laba ditahan

yang sudah ditentukan penggunaannya). Pada tahun 2019 juga dilakukan peningkatan CKPN dari 30% menjadi 92%.

Pencadangan kerugian sesuai dengan PSAK 71 juga membuat biaya kredit (*cost of credit/COC*) mengalami peningkatan. Namun, tidak ada dampak signifikan dari implementasi PSAK 71 bagi BJB dan rasio CoC lebih stabil karena sudah dilakukannya persiapan implementasi sejak lama dengan melakukan pencadangan (*coverage*) yang cukup (Sitanggung, 2020). Sekretaris Perusahaan Bank BJB mengatakan bahwa di tahun 2019 CoC relatif di bawah 1%. Hingga akhir tahun 2020 ini, diproyeksikan CoC akan terjaga di level sama yakni 0,6%-0,7%. Untuk NPL juga masih terbilang rendah, yakni di bawah 2%. Tahun 2020, diharapkan NPL maksimal akan ada di level 1,6%-1,7%.

6. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Upaya persiapan penerapan PSAK 71 yang telah dilakukan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk adalah membuat sistem baru untuk mengimplementasikan PSAK 71 dengan alokasi biaya sebesar 2 miliar rupiah. Direktur Kepatuhan PT Bank Woori Saudara Tbk (BWS) I menyatakan bahwa diperlukan tambahan biaya CKPN sebesar Rp 101 miliar, kurang lebih 38% (*coverage ratio*) yang diambil dari porsi laba ditahan perusahaan. Bank BWS juga melakukan proses pengujian PSAK 71 dengan KPMG sebagai konsultan.

Secara keseluruhan dalam Laporan Perubahan Ekuitas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk periode 31 Maret 2020 terlihat bahwa terdapat penurunan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya setelah dilakukan penerapan PSAK 71, yaitu sebesar 125.041.000.000 atau sekitar 4%. Untuk penyesuaian penerapan PSAK 71 yang berpengaruh pada cadangan kerugian penurunan nilai hanya berdampak pada pinjaman yang diberikan serta tagihan dan liabilitas akseptasi. Terkait dengan wabah corona yang secara signifikan meningkatkan NPL/kredit bermasalah, Bank Woori akan lebih fokus melakukan pembiayaan ke segmen UMKM dan konsumen ritel serta secara aktif melakukan pengecekan terhadap nasabah dan juga agunan kreditnya (tribunjateng.com, 2020). Sementara untuk pencadangan, Bank Woori belum berencana menaikkan CKPN untuk mengantisipasi corona. Tetapi, kenaikan CKPN yang dilakukan tahun ini lebih karena mengantisipasi implementasi standar akuntansi PSAK 71.

SIMPULAN

Kebijakan akuntansi terkait investasi obligasi dari 6 perusahaan yang digunakan dalam penelitian yang berlaku sejak 1 Januari 2020, yaitu sesuai dengan PSAK 71. Secara umum, pengakuan dan pengukuran investasi obligasi yang dilakukan perusahaan sesuai dengan klasifikasi masing-masing aset keuangan yang ditentukan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual. Terkait dengan pengungkapan saldo cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan perusahaan berdasarkan metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) yang lebih mengantisipasi kedepan (*forward-looking*) dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas.

Secara keseluruhan, keenam perusahaan perbankan telah melakukan berbagai upaya dengan baik dalam mempersiapkan penerapan PSAK 71. Penundaan berlakunya implementasi PSAK 71 selama satu tahun telah membantu perusahaan melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi internal perusahaan dengan melakukan perkiraan perhitungan penambahan cadangan kerugian penurunan nilai, penggunaan sistem teknologi dan lembaga konsultan dalam membantu penerapan PSAK 71 dan dari sisi eksternal perusahaan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengimplementasian ini. Keenam perusahaan merupakan bank besar yang memiliki manajemen risiko baik, sehingga dalam penerapan PSAK 71 tidak mengakibatkan dampak signifikan yang mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan ketika menerapkan PSAK 71 adalah adanya wabah corona yang mengakibatkan perusahaan melakukan beberapa restrukturisasi kredit dan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai.

SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 6 objek penelitian pada perusahaan keuangan subsektor perbankan, sehingga tidak dapat menggeneralisir perusahaan dalam sektor maupun subsektor lainnya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data dan informasi perusahaan sektor maupun subsektor lainnya agar dapat dilakukan perbandingan yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga hanya menggunakan data laporan keuangan pada laman Bursa Efek Indonesia dan informasi media online, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan

analisis dengan metode wawancara ke berbagai pihak narasumber yang memiliki keahlian di bidang pembahasan ini agar dapat mendukung hasil pembahasan yang lebih argumentatif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis masing-masing komponen aset keuangan yang dimiliki perusahaan agar pembahasan yang dilakukan dapat lebih mendalam karena penelitian ini hanya melihat aset keuangan efek dan surat berharga secara keseluruhan.

Perusahaan perbankan perlu menjelaskan PSAK yang menjadi dasar perlakuan akuntansi agar pengguna laporan keuangan dapat mengetahui secara pasti standar akuntansi mana yang digunakan oleh perusahaan. Terkait perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan lebih baik disajikan secara rinci seluruh aspek perbedaan sebelum perubahan dan setelah perubahan agar pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderianti, S. (2018). *Mengenal Berbagai Lembaga Keuangan di Indonesia*. <https://www.cekaja.com/info/mengenal-berbagai-lembaga-keuangan-di-indonesia/>
- Alkhatiri, M., & Firmansyah, A. (2018). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Obligasi pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Konstruksi*. 2(1), 137–156.
- Bankmandiri.co.id. (n.d.). *Digital Highlight*. <https://www.bankmandiri.co.id/en/digital-highlight>
- britama.com. (2012a). *Sejarah dan Profil Singkat AGRO (Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk / BRI AGRO)*. <https://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-agro/>
- britama.com. (2012b). *Sejarah dan Profil Singkat BBKA (Bank Central Asia Tbk / Bank BCA)*. <https://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-bbca/>
- britama.com. (2012c). *Sejarah dan Profil Singkat BBRI (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / Bank BRI)*. <https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-bbri/>
- britama.com. (2012d). *Sejarah dan Profil Singkat BJBR (Bank Jabar Banten / Bank BJB)*. <https://britama.com/index.php/2012/09/sejarah-dan-profil-singkat-bjbr/>
- britama.com. (2012e). *Sejarah dan Profil Singkat BMRI (Bank Mandiri (Persero) Tbk)*. <https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-bmri/>
- britama.com. (2012f). *Sejarah dan Profil Singkat SDRA (Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk)*. <https://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-sdra/>
- Dewi, P. Y. P., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh produktivitas dan pertumbuhan perusahaan pada peringkat obligasi dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 467–495.
- Dirgantara, H. (2020). *Analisis nilai implementasi PSAK 71 tidak akan membebani kinerja Bank*

- Mandiri. <https://investasi.kontan.co.id/news/analisis-nilai-implementasi-psak-71-tidak-akan-membebanikan-kinerja-bank-mandiri>
- Fachrizal, R. (2019). *Antisipasi Risiko Penerapan IFRS 9/PSAK 71, BRI Adopsi Solusi dari SAS*. <https://infokomputer.grid.id/read/121611080/antisipasi-risiko-penerapan-ifrs-9psak-71-bri-adopsi-solusi-dari-sas>
- Fajrian, H. (2019). *Obligasi Akan Jadi Instrumen Investasi Paling Menarik 3 Bulan ke Depan*. <https://katadata.co.id/berita/2019/07/26/obligasi-akan-jadi-instrumen-investasi-paling-menarik-3-bulan-ke-depan>
- Hamdan, N. (2020). *PSAK 71 Buat Modal BCA Tergerus Hingga Rp 8 Triliun*. <https://www.tagar.id/psak-71-buat-modal-bca-tergerus-hingga-rp-8-triliun>
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 71: Instrumen Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jaluanto, & Nafi'ah, F. (2016). Penerbitan Obligasi dan Investasi Aktiva Tetap pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012- 2013. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(2), 69-82.
- Mudjiyono. (2012). Investasi dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas pada Pasar Modal Indonesia. *Jurnal STIE Semarang*, 4(2), 1-18.
- Nurdiana, A. (2020). *Restrukturisasi kredit Bank Rakyat Indonesia (BBRI) gede, analisis pangkas target*. <https://investasi.kontan.co.id/news/restrukturisasi-kredit-bank-rakyat-indonesia-bbri-gede-analisis-pangkas-target>
- Oliver, J. (2013). *Landasan Teori*. 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prastika, G. E. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Obligasi dan Reputasi KAP terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*.
- Sahara, N. (2020). *BRI Bagikan Dividen Rp 20,62 Triliun*. <https://investor.id/finance/bri-bagikan-dividen-rp-2062-triliun>
- SAL. (2019). *Investasi Obligasi, Ini Kelebihan dan Kekurangannya*. <https://www.pikirantrader.com/investasi/7276-investasi-obligasi-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Sitanggang, L. M. S. (2019). *Demi penuhi PSAK 71, bank berlomba pupuk pencadangan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/demi-penuhi-psak-71-bank-berlomba-pupuk-pencadangan>
- Sitanggang, L. M. S. (2020). *PSAK 71 diterapkan, biaya kredit bank dipastikan turun tahun ini*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/psak-71-diterapkan-biaya-kredit-bank-dipastikan-turun-tahun-ini?page=2>
- Sunarjanto, N. A., & Tulasi, D. (2013). *Kemampuan Rasio Keuangan dan Corporate Governance Memprediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Consumer Goods*.

Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 17(2), 230-242.

Syafina, D. C. (2019). *Bagaimana PSAK 71 Memengaruhi Perbankan?*
<https://tirto.id/bagaimana-psak-71-memengaruhi-perbankan-ehPf>

Vina. (2017). Analisis Pengaruh Reputasi Auditor, Umur Obligasi, Likuiditas, Growth, dan Produktivitas Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi pada Pertumbuhan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol., 15(1), 1-22.*

<https://jateng.tribunnews.com/2020/03/05/isu-virus-corona-potensi-dongkrak-kredit-bermasalah-industri-perbankan?page=2>

<https://www.undercover.co.id/pemahaman-investasi-dan-contohnya/>

<https://money.kompas.com/read/2019/07/24/211100326/kasus-perusahaan-tekstil-terbesar-gagal-bayar-bunga-obligasi-ini-kata-bos-bca?page=all>